

**ANALISIS PENERIMAAN PAJAK HOTEL, PAJAK RESTORAN, PAJAK HIBURAN  
SEBAGAI SUMBER PENDAPATAN ASLI DAERAH  
(Studi Pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Malang)**

**RORO BELLA AYU WANDANI PRASETIO PUTRI  
SRIKANDI KUMADJI  
AGUNG DARONO**

(PS Perpajakan, Jurusan Administrasi Bisnis, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas  
Brawijaya, bellaayu92@gmail.com)

**ABSTRACT**

*The Local Genuine Income (PAD) is a source of local income which may consist of local tax, local retribution, separated local wealth management, and others. Hotel Tax, Restaurant Tax and Entertainment Tax are local tax components. Hotel, restaurant and entertainment are a potential sector for the improvement of local revenue. The objective of research is to understand the contribution, effectiveness and growth rates of hotel, restaurant and entertainment taxes to local tax and Local Genuine Income. It is expected that research will provide benefit and input for the local government of Malang City, especially to the Official of Local Income. Research method is descriptive. Data are secondary which obtain from The Report of Target and Realization of Local Income Revenue from the Period 2006-2013 made by The Official of Local Income. The Result of research indicates that hotel, restaurant and entertainment taxes in Malang City have quite great potential compared to other tax types. It is consistent to research objective which is to analyze and to explain the contribution, effectiveness and growth rates of hotel, restaurant and entertainment taxes to Local Genuine Income. The average contribution rate of hotel tax to Local Genuine Income is 5.81%, while those of restaurant tax and entertainment tax are 10.36 % and 1.77 %. The average effectiveness rate of hotel tax is 106.94 %, while those of restaurant tax and entertainment tax are 105.31 % and 113.74 %. The growth rates of hotel, restaurant and entertainment taxes are 22.77 %, 11.11 % and 21.54 %.*

**Keywords:** *Local Genuine Income, Local Tax, Hotel Tax, Entertainment Tax, Restaurant Tax, Contribution, Effectiveness, Growth Rate*

**PENDAHULUAN**

Negara Republik Indonesia sebagai Negara Kesatuan menganut asas desentralisasi dalam penyelenggaraan pemerintahan, dengan memberikan kesempatan dan keleluasaan kepada daerah untuk menyelenggarakan otonomi daerah (Bratakusumah dan Solihin, 2001:1). Undang-Undang Dasar 1945 merupakan landasan yang kuat untuk menyelenggarakan otonomi dengan memberikan kewenangan yang luas, nyata, dan bertanggung jawab kepada daerah, sebagaimana tertuang dalam Ketetapan MPR-RI Nomor XV/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Otonomi Daerah.

Daerah berwenang mengelola sumber daya nasional yang tersedia di wilayahnya dan bertanggung jawab memelihara kelestarian lingkungan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Kewenangan pemerintahan yang diserahkan kepada daerah dalam rangka desentralisasi harus disertai dengan penyerahan dan pengalihan pembiayaan, sarana dan prasarana, serta sumber daya manusia sesuai dengan kewenangan yang diserahkan kepada daerah tersebut (Bratakusumah dan Solihin, 2001:11-12). Pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk melakukan pemungutan terhadap pajak-pajak tertentu (*taxing power*), melakukan usaha-usaha tertentu untuk mendapatkan sejumlah uang agar dapat membiayai pengeluaran rutin dan pengeluaran pembangunan, membuat peraturan-peraturan

daerah yang dibutuhkan dalam menyelenggarakan pemerintahan daerah dan berhak untuk memperoleh sejumlah dana yang berupa transfer dari pemerintah pusat (Halim dan Husein, 2009:154). Semakin tinggi kekuatan pengenaan pajak, semakin tinggi proporsi PAD terhadap total anggaran. Disamping itu daerah tersebut menjadi lebih otonom (Khusaini, 2006:222).

Sumber-sumber pembiayaan pelaksanaan desentralisasi berasal dari PAD, dana perimbangan, pinjaman daerah, dan lain-lain penerimaan yang sah. Sumber PAD merupakan sumber keuangan daerah yang digali dari dalam wilayah daerah yang bersangkutan yang terdiri dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah. Salah satu sumber keuangan daerah yang dapat dioptimalkan penggaliannya adalah PAD (Sobandi, 2005:26).

PAD merupakan pendapatan daerah sendiri yang potensinya berada di daerah dan dikelola oleh Pemerintah Daerah yang bersangkutan. Undang-Undang No. 32 Tahun 2000 menjelaskan sumber pendapatan daerah terdiri atas PAD, yaitu hasil pajak daerah, retribusi daerah, pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah. PAD yang berasal dari sumber-sumber keuangan seperti yang telah disebutkan, harus selalu diupayakan agar terus meningkat dari tahun ke tahun sesuai dengan perkembangan pembangunan daerah.

Data dari Direktorat Jenderal Perimbangan dan Keuangan (DJPK), Kementerian Keuangan sampai dengan bulan mei tahun 2014 jumlah transfer pusat ke daerah untuk provinsi/kabupaten/kota seluruh Indonesia selalu mengalami peningkatan tiap tahunnya. Pada tahun 2006 jumlah transfer sebesar Rp 220,8 triliun, meningkat pada tahun 2007 sebesar Rp 253,26 triliun, tahun 2008 sebesar Rp 292,43 triliun, 2009 sebesar Rp 308,59 triliun, meningkat pada tahun 2010 menjadi Rp 344,73 triliun. Pada tahun 2011 daerah mendapatkan transfer sebesar Rp 411, 32 triliun, meningkat pada tahun 2012 sebesar Rp 478,78 triliun dan terakhir di tahun 2013 dana transfer dari pusat ke daerah sebesar Rp 528,62 triliun

Sejalan dengan pelaksanaan otonomi daerah, setiap daerah yang ada di Indonesia dituntut untuk selalu berupaya meningkatkan sumber PAD (Nugraha dan Triantoro, 2004:379). Peningkatan PAD akan tercapai apabila sumber-sumber yang mempengaruhinya mengalami peningkatan, agar sumber-sumber tersebut meningkat maka dalam pengelolaan dan pelaksanaan daerah haruslah optimal. Salah satu sumber yang dapat meningkatkan PAD adalah pajak daerah. Apabila pemungutan pajak daerah dapat dilaksanakan secara optimal maka PAD dapat meningkat.

Sehubungan dengan ditetapkannya Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah selanjutnya disebut dengan UU PDRD pada tanggal 15 September 2009, maka terdapat pedoman terkait pelaksanaan pemungutan maupun jenis pajak yang harus dibayar oleh masyarakat pada daerah tersebut. Adanya Undang-Undang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagai pelengkap dan aturan yang diatur dalam peraturan daerah baik tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. Beberapa jenis pajak daerah yang dipungut oleh daerah khususnya untuk kabupaten dan kota yaitu: (1) Pajak Hotel; (2) Pajak Restoran; (3) Pajak Hiburan; (4) Pajak Reklame; (5) Pajak Penerangan Jalan; (6) Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan; (7) Pajak Parkir; (8) Pajak Air Tanah; (9) Pajak Sarang Burung Walet; (10) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2); dan (11) Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).

Dari data Badan Pusat Statistik tahun 2000, kontribusi yang cukup signifikan dalam membangun perekonomian Kota Malang yaitu sektor industri pengolahan sebesar 35,84%, kemudian diikuti oleh sektor perdagangan, hotel, restoran dan wisata sebesar 32,22%. Sektor pariwisata mempunyai peranan yang penting dalam pembangunan nasional : meratakan dan meningkatkan kesempatan kerja dan pendapatan, memperkokoh persatuan dan kesatuan, serta budaya bangsa (Yoeti, 2008:2).

Kota Malang merupakan kota terbesar kedua setelah Surabaya, sebagai salah satu kota berbasis pada sektor pariwisata dalam pengembangannya

dituntut untuk meningkatkan sarana dan prasarana serta pelayanan yang baik dalam bidang pariwisata, yang secara otomatis tidak terlepas dari peningkatan dan pengembangan hotel, restoran dan hiburan sebagai penunjang dari sektor wisata (BPS, 2011). Kota Malang memiliki potensi yang besar di sektor jasa dan pariwisata yang dapat dikembangkan, sehingga memberikan kontribusi terhadap penerimaan pajak yang menambah PAD.

Data Dinas Pendapatan Daerah dari tahun 2006-2013, menunjukkan penerimaan Pajak Hotel, Pajak Restoran dan Pajak Hiburan di Kota Malang terus meningkat. Berdasarkan hal tersebut, Pajak Hotel, Pajak Restoran dan Pajak Hiburan merupakan sumber pendapatan daerah yang potensial untuk dikembangkan sesuai dengan pertumbuhan pembangunan Kota Malang yang sangat strategis untuk berinvestasi jika dikelola dengan baik. Berikut data terkait penerimaan Pajak Hotel, Pajak Restoran dan Pajak Hiburan dari tahun 2006 sampai dengan tahun 2013 :

**Tabel 1. Data terkait penerimaan Pajak Hotel, Pajak Restoran dan Pajak Hiburan dari tahun 2006-2013**

Tahun	Pajak Hotel	Pajak Restoran	Pajak Hiburan
2006	3.315.721	6.653.121	1.380.141
2007	3.932.900	7.762.908	1.724.554
2008	4.558.414	8.965.377	1.778.167
2009	5.204.343	10.769.904	1.792.499
2010	7.335.306	14.933.511	2.043.895
2011	8.485.719	17.992.471	2.343.426
2012	9.787.551	20.302.610	3.134.172
2013	13.934.800	25.479.671	4.083.522

Salah satu upaya dalam meningkatkan pajak hotel, restoran dan hiburan dengan menggunakan *electronic tax (E-Tax)* yang mulai diberlakukan di Kota Malang Oktober 2013. Sistem ini merupakan sistem terbaru yang digunakan untuk mengatasi kebocoran pajak daerah. Sistem e-tax baru digunakan pada 4 jenis pajak saja, yaitu pajak hotel, restoran, hiburan dan parkir ([www.malangkota.go.id](http://www.malangkota.go.id)). Dengan adanya potensi daerah yang ada dapat menghasilkan pemasukan besar kepada PAD Kota Malang, maka pihak pemerintah daerah Kota Malang melalui Dinas Pendapatan Daerah berupaya untuk meningkatkan PAD Kota Malang dengan jalan menggali sumber-sumber pendapatan daerah yang dimiliki dari potensi daerah yang ada. Dari beberapa komponen pajak daerah yang dikelola Kota Malang yang menarik untuk diteliti oleh penulis adalah Pajak Hotel, Pajak Restoran dan Pajak Hiburan periode 2006-2013.

## KAJIAN PUSTAKA

### *Otonomi Daerah*

Menurut Undang-undang No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah pengertian otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pelaksanaan otonomi daerah harus dapat meningkatkan kemandirian daerah. Oleh karena itu, dalam penyelenggaraan otonomi daerah didasarkan atas asas desentralisasi dalam wujud otonomi yang luas, nyata, dan bertanggung jawab kepada daerah secara proporsional diwujudkan dengan pembagian dan pemanfaatan sumber daya nasional yang berkeadilan serta perimbangan keuangan pusat dan daerah.

### *Pendapatan Asli Daerah (PAD)*

PAD merupakan pendapatan yang berasal dari pemanfaatan dan penggalan potensi yang dimiliki oleh daerah. Di era otonomi daerah ini, daerah dituntut untuk mencari alternatif lain yang dapat dimanfaatkan sebagai bentuk inovasi sistem guna meningkatkan pendapatan daerah. Menurut Muluk (2006:77) PAD atau *locally raised revenue* merupakan pendapatan yang ditentukan dan dikumpulkan secara lokal. Sedangkan menurut Widjaya (1992:42) PAD merupakan salah satu modal dasar pemerintah daerah dalam mendapatkan dana pembangunan dalam memenuhi belanja daerah dan usaha daerah guna memperkecil ketergantungan dalam mendapatkan dana dari pemerintah tingkat atas (subsidi). Sementara itu, PAD menurut Halim (2004:67) yaitu semua penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah. Adapun komponen dari PAD dibagi menjadi empat jenis, yaitu: (1) Pajak daerah; (2) Retribusi daerah; (3) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; (4) Lain-lain PAD yang sah.

Salah satu upaya untuk melihat kemampuan daerah dalam rangka *self supporting* dari segi keuangan daerah dalam rangka mengurangi ketergantungan terhadap pemerintah pusat adalah dengan melihat komposisi dari penerimaan daerah yang ada. Semakin besar komposisi PAD, semakin besar pula kemampuan daerah untuk memikul tanggung jawab yang lebih besar. Namun semakin kecil komposisi PAD terhadap penerimaan daerah, maka ketergantungan terhadap pusat juga semakin besar. Sedangkan dampak yang dirasakan masyarakat dengan adanya peningkatan penerimaan PAD adalah kelancaran pembangunan. Pembangunan ini meliputi berbagai sektor diantaranya pembangunan jalan, pembangunan fasilitas umum dan fasilitas lain (Ardiyansyah, 2005:61).

### *Pajak Daerah*

Menurut Musgrave dan Musgrave (1989) menjelaskan bahwa "Pajak merupakan suatu iuran yang wajib dibayar oleh rakyat kepada pemerintah yang sifatnya dapat dipaksakan dan tanpa balas jasa. Dengan kata lain, pajak adalah suatu bentuk iuran kepada negara yang dapat dipaksakan pemungutannya kepada wajib pajak atau yang wajib membayarnya tanpa balas jasa apapun".

Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut Pajak menurut Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 pasal 1 ayat 10 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

### *Pajak Hotel*

Sesuai dengan Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 Pasal 1 angka 20 dan 21, Pajak Hotel adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel. Sedangkan yang dimaksud dengan hotel adalah fasilitas penyedia jasa penginapan/peristirahatan termasuk jasa yang terkait lainnya dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga motel, losmen, gubuk pariwisata, wisma pariwisata, pesanggrahan, rumah penginapan dan sejenisnya, serta rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari 10 (sepuluh). Berdasarkan Perda Kota Malang No.16 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah Pasal 4, Objek Pajak Hotel adalah pelayanan yang disediakan hotel dengan pembayaran, termasuk jasa penunjang sebagai kelengkapan hotel yang sifatnya memberikan kemudahan dan kenyamanan, termasuk fasilitas olahraga dan hiburan. Sedangkan yang menjadi subjek pajak adalah orang pribadi atau badan yang mengusahakan hotel. Tarif Pajak Hotel untuk yaitu motel, losmen, rumah penginapan dan kegiatan usaha lainnya yang sejenis ditetapkan tarif sebesar 10 % (sepuluh persen), sedangkan tarif Pajak Hotel untuk rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari 10 (sepuluh) dikenakan tarif 5% (lima persen).

### *Pajak Restoran*

Sesuai dengan Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 Pasal 1 angka 22 dan 23, pengertian Pajak Restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran. Yang dimaksudkan restoran adalah fasilitas penyedia makanan dan atau minuman dengan dipungut bayaran, yang mencakup rumah makan, kafetaria, kantin, warung, bar, dan sejenisnya termasuk jasa boga/catering. Berdasarkan Perda No. 16 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah, pada Pasal 12 menjelaskan pengertian objek Pajak Restoran adalah pelayanan yang disediakan oleh restoran, meliputi makanan dan atau minuman yang

dikonsumsi pembeli, baik dikonsumsi di tempat pelayanan maupun di tempat lain. Sedangkan yang menjadi subjek pajak adalah orang pribadi atau badan yang mengusahakan restoran. Tarif Pajak Restoran yaitu apabila restoran dengan nilai penjualannya diatas Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) sampai dengan Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) per bulan tarifnya sebesar 5% (lima persen). Apabila restoran dengan nilai penjualannya diatas Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) per bulan tarifnya sebesar 10% (sepuluh persen).

### Pajak Hiburan

Menurut Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 Pasal 1 angka 24 dan 25, Pajak Hiburan adalah pajak atas penyelenggaraan hiburan. Hiburan adalah semua jenis tontonan, pertunjukkan, permainan, dan atau keramaian yang dinikmati dengan dipungut bayaran dan dinikmati oleh umum. Menurut Peraturan Daerah No.16 Tahun 2010 Pasal 22 objek pajak hiburan adalah jasa penyelenggaraan hiburan dengan dipungut bayaran. Disebutkan dalam Peraturan Daerah No.16 Tahun 2010 Pasal 23 bahwa subjek pajak hiburan adalah orang pribadi atau badan yang menikmati hiburan. Wajib pajak hiburan adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan hiburan. Tarif minimum yang dikenakan untuk Pajak Hiburan adalah 5%. Dan untuk tarif tertinggi sebesar 35%.

## METODE PENELITIAN

### Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif. Lokasi penelitian di Kota Malang dan situs penelitian di Dinas Pendapatan Daerah yang merupakan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang memiliki tugas pokok dan fungsi untuk melaksanakan kebijakan daerah di bidang penerimaan dan pendapatan daerah. Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah data sekunder dengan jenis data *times series*. Teknik pengumpulan data menggunakan studi dokumenter yaitu cara mengumpulkan data yang dilakukan dengan katagorisasi dan klasifikasi bahan-bahan tertulis yang berhubungan dengan masalah penelitian. Sumber data yang digunakan data sekunder. Metode analisis data yang digunakan dalam menganalisis setiap aspek-aspek yang dibutuhkan, yaitu kontribusi, tingkat efektivitas dan laju pertumbuhan Pajak Hotel, Pajak Restoran dan Pajak Hiburan terhadap PAD.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Perkembangan PAD Kota Malang

Pajak daerah Kota Malang dari tahun 2006 sampai dengan tahun 2013 terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2007 pajak daerah mengalami peningkatan pertumbuhan sebesar 17,00% dari realisasi pajak

daerah pada tahun 2006 sebesar Rp 32.123.673.031,21. Pada tahun 2008 pertumbuhannya menurun 3,3% menjadi 13,70%. Sedangkan tahun 2009 pertumbuhannya (2,07) sebesar 15,77% dengan realisasinya Rp 49.467.066.282,96. Pada tahun 2010 terdapat peningkatan 4,6% dari 17% menjadi 21,60%. Meningkat tajam pada tahun 2011 sebesar 108,36%. Namun pada tahun 2012 menurun sebesar 81,4% dari 108,36% menjadi 26,96%. Kemudian meningkat pada tahun 2013 yaitu sebesar 49,88%.

Jumlah realisasi PAD Kota Malang dari tahun 2006-2013 sebesar 1,182 triliun rupiah, dibandingkan dengan hasil realisasi penerimaan dana perimbangan yang terdiri dari Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) yang diterima oleh Kota Malang dari tahun 2006-2013 yaitu sebesar 5,078 triliun rupiah menunjukkan ketimpangan penerimaan yang besar dan ini menunjukkan ketergantungan pemerintah Kota Malang masih sangat tinggi terhadap pemerintah pusat.

## Hasil Analisis Data

### 1. Analisis Kontribusi

Menurut Halim (2004:163) Kontribusi Pajak Hotel, Pajak Restoran dan Pajak Hiburan Kota Malang untuk tahun 2006-2013 dapat diukur dengan rumus berikut:

- Kontribusi Pajak Hotel =  $\frac{\text{Realisasi Penerimaan Pajak Hotel}}{\text{Realisasi Pendapatan Asli Daerah}} \times 100\%$
- Kontribusi Pajak Restoran =  $\frac{\text{Realisasi Penerimaan Pajak Restoran}}{\text{Realisasi Pendapatan Asli Daerah}} \times 100\%$
- Kontribusi Pajak Hiburan =  $\frac{\text{Realisasi Penerimaan Pajak Hiburan}}{\text{Realisasi Pendapatan Asli Daerah}} \times 100\%$

#### a. Kontribusi Pajak Hotel

Kontribusi hotel bintang dan hotel tidak berbintang terhadap PAD Kota Malang dari tahun 2006 hingga tahun 2013 juga menunjukkan *trend* fluktuatif. Untuk kontribusi hotel berbintang terdapat kontribusi tertinggi pada tahun 2013 yaitu sebesar 4,46% dan paling rendah pada tahun 2007 yaitu 2,76%. Rata-rata kontribusi hotel berbintang terhadap PAD yaitu 3,58%, dimana terdapat hasil kontribusi yang berada di atas rata-rata kontribusi yaitu pada tahun 2008 yaitu 3,78%, tahun 2009 sebesar 4%, tahun 2010 sebesar 4,18% dan pada tahun 2013 dan merupakan hasil kontribusi tertinggi yaitu sebesar 4,46%.

Sementara itu, untuk kontribusi hotel tidak berbintang terhadap PAD menunjukkan kontribusi tertinggi pada tahun 2010 yaitu sebesar 2,29% dan kontribusi terendah pada tahun 2007 yaitu sebesar 1,30%. Rata-rata hasil kontribusi hotel tidak berbintang terhadap PAD yaitu sebesar 1,63%, dimana terdapat hasil kontribusi yang berada di atas rata-rata yaitu pada tahun 2006 yaitu sebesar 1,80%, tahun 2008 sebesar 1,69%, pada tahun 2009 sebesar 1,66%

dan pada tahun 2010 sebesar 2,29%. Kontribusi hotel berbintang dan tidak berbintang terhadap PAD menunjukkan hasil kriteria sangat kurang berkontribusi karena rata-rata keduanya berada dibawah 10% sesuai dengan kriteria kontribusi dari Depdagri tahun 1996.

b. Kontribusi Pajak Restoran

Pada tahun 2006 tidak dijabarkan karena tidak adanya informasi terkait realisasi restoran, rumah makan dan *cafe*, sehingga tidak dapat diketahui kontribusinya. Kontribusi restoran, rumah makan dan *cafe* terhadap PAD menunjukkan trend fluktuatif, begitu pula untuk rumah makan dan *cafe*. Kontribusi tertinggi untuk restoran terdapat pada tahun 2010 yaitu 8,48% dan untuk kontribusi terendah terdapat pada tahun 2011 yaitu 6,04%. Kemudian rata-rata kontribusi restoran terhadap pajak daerah adalah sebesar 6,97%.

Kontribusi rumah makan dan *cafe* mencapai puncak kontribusi tertinggi pada tahun 2010 yaitu 4,68%. Kontribusi terendah pada tahun 2008 yaitu 1,78%. Rata-rata kontribusi rumah makan dan *cafe* yaitu 3,42% yang artinya sangat kurang berkontribusi bagi pajak daerah. Pada tahun 2009, 2010, 2011 dan 2013 kontribusi berada di atas rata-rata yaitu sebesar 4,22%, 4,68%, 3,65% dan 3,54%. Sehingga restoran, rumah makan dan *cafe* menunjukkan hasil sangat kurang berkontribusi terhadap pajak daerah karena berada dibawah 10%.

c. Kontribusi Pajak Hiburan

Kontribusi tertinggi hiburan tetap terhadap PAD yaitu sebesar 1,87% pada tahun 2008. Untuk kontribusi terendah yaitu sebesar 1,09% pada tahun 2011. Terdapat 5 (empat) tahun yang hasil kontribusinya berada diatas rata-rata pada tahun 2007, 2008, 2009, 2010 dan 2013 yaitu sebesar 1,50%, 1,87%, 1,83%, 1,50% dan 1,66%.

Kemudian untuk kontribusi tertinggi hiburan insidenstil terhadap PAD yaitu sebesar 0,95% pada tahun 2006. Dan kontribusi terendah yaitu sebesar 0,12% adalah pada tahun 2009. Rata-rata kontribusi hiburan insidentil yaitu sebesar 0,29%. Pada tahun 2006 dan 2010 hasil kontribusinya berada diatas rata-rata yaitu 0,95% dan 0,30%. Rata-rata hiburan tetap dan hiburan insidentil menunjukkan hasil sangat kurang berkontribusi terhadap PAD, karena berada dibawah 10%.

2. Analisis Efektivitas

Guna mengetahui efektivitas Pajak Hotel, Pajak Restoran dan Pajak Hiburan terlebih dahulu membandingkan antara realisasi penerimaan pajak hotel, pajak restoran dan pajak hiburan terhadap target yang ditetapkan, sehingga untuk menghitung tingkat efektivitasnya menggunakan rumus berikut (Halim,2001):

Efektivitas

=

$$\frac{\text{Realisasi Penerimaan Pajak Hotel,Pajak Restoran dan Pajak Hiburan}}{\text{Target penerimaan Pajak Hotel,Pajak Restoran dan Pajak Hiburan}} \times 100\%$$

a. Efektivitas Pajak Hotel

Tabel 2. Tingkat Efektivitas Pajak Hotel dari Tahun 2006-2013

Tahun	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase (%)
2006	3.100.000.000,00	3.315.721.013,27	106,96
2007	3.892.500.000,00	3.932.900.034,71	101,04
2008	4.398.700.000,00	4.558.413.834,00	103,63
2009	5.085.730.000,00	5.204.343.124,55	102,33
2010	6.600.928.510,40	7.328.195.695,95	111,02
2011	7.937.911.592,30	8.136.987.336,76	102,51
2012	8.913.290.057,77	9.787.551.997,94	109,81
2013	11.115.346.405,15	13.934.800.659,87	125,37
Rata-rata			107,8

Tabel efektivitas pajak hotel diatas menunjukkan tingkat efektivitas pada tahun 2006 hingga tahun 2013 sangat efektif. Persentase tertinggi ada di tahun 2013 dan persentase terendah ada di tahun 2007. Meskipun sudah sangat efektif karena berada diatas 100%, namun persentasenya masih menunjukkan *trend* fluktuatif. Sedangkan target dan realisasi dari tahun ke tahun cenderung meningkat setiap tahunnya.

b. Efektivitas Pajak Restoran

Tabel 3. Tingkat Efektivitas Pajak Restoran dari Tahun 2006-2013

Tahun	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase (%)
2006	6.599.981.250,00	6.653.121.175,41	100,81
2007	7.714.979.844,00	7.762.908.408,44	100,62
2008	8.718.680.000,00	8.965.376.803,28	102,82
2009	10.590.548.000,00	10.769.903.845,71	101,69
2010	13.762.656.497,25	14.929.491.495,95	108,48
2011	16.551.035.303,41	16.888.172.394,13	102,04
2012	18.006.103.686,81	20.302.610.876,34	112,75
2013	21.437.718.910,80	25.479.671.734,31	118,85
Rata-rata			106,01

Tidak berbeda dengan tingkat efektivitas pajak hotel, pajak restoran juga mengalami *trend* fluktuatif. Sedangkan hasilnya menunjukkan tingkat efektivitasnya sangat efektif dari tahun 2006 hingga tahun 2013. Persentase tertinggi ada di tahun 2013 dan persentase terendah ada di tahun 2007. Meskipun di setiap tahunnya sudah baik, namun tetap harus ada peningkatan. Perlu dilakukan langkah-langkah yang dapat membantu untuk peningkatan penerimaan pajak restoran.

c. Efektivitas Pajak Hiburan

Tabel 4. Tingkat Efektivitas Pajak Hiburan dari Tahun 2006-2013

Tahun	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase (%)
2006	1.575.000.000,00	1.380.141.329,00	87,63
2007	1.580.000.000,00	1.724.554.425,00	109,15
2008	1.752.930.000,00	1.778.167.000,50	101,44
2009	1.787.988.600,00	1.792.499.083,70	100,25
2010	1.807.988.600,00	2.041.298.212,05	112,90
2011	1.897.988.600,00	2.359.059.325,80	124,29
2012	1.972.989.350,00	3.134.172.824,60	158,85
2013	3.451.736.261,10	4.083.522.176,70	118,30
Rata-rata			114,10

Berdasarkan tabel efektivitas pajak hiburan diatas, dapat dilihat tingkat persentase efektivitas dari tahun 2006 hingga tahun 2013 hasilnya sangat efektif, kecuali pada tahun 2006 yang hasilnya efektif karena dibawah 100%. Persentase tertinggi ada di tahun 2012 dan persentase terendah ada di tahun 2006. Rata-rata persentase efektivitas dari pajak hiburan adalah sebesar 114,10% dan menunjukkan rata-rata paling tinggi dibandingkan dengan rata-rata pajak hotel dan pajak restoran.

3. Laju Pertumbuhan

Untuk menghitung laju pertumbuhan dapat menggunakan rumus berikut (Dajan, 2009:151) :

$$GM = \sqrt[n-1]{\frac{X_n}{X_o}} - 1$$

Keterangan :

- GM = Jumlah rata-rata laju pertumbuhan
- N = Jumlah tahun (periode)
- Xn = Nilai pada periode akhir
- Xo = Nilai pada periode dasar

a. Laju Pertumbuhan Pajak Hotel

Tabel 5. Laju Pertumbuhan Pajak Hotel dari Tahun 2006-2013

Tahun	Realisasi Tahun Akhir (Rp)	Realisasi Tahun Awal (Rp)	Persentase (%)
2007	3.932.900.034,71	3.315.721.013,27	18,78
2008	4.558.413.834,00	3.932.900.034,71	18,72
2009	5.204.343.124,55	4.558.413.834,00	13,16
2010	7.328.195.695,95	5.204.343.124,55	19,27
2011	8.136.987.336,76	7.328.195.695,95	18,60
2012	9.787.551.997,94	8.136.987.336,76	18,82
2013	13.934.800.659,87	9.787.551.997,94	19,31
Rata-rata	13.934.800.659,87	3.315.721.013,27	22,77

Berdasarkan tabel laju pertumbuhan pajak hotel, dapat diketahui laju pertumbuhan pajak

hotel di Kota Malang per tahun dari tahun 2006 hingga 2013. Laju pertumbuhan tertinggi pada tahun 2010 yaitu sebesar 19,27%. Dan laju pertumbuhan terendah ada pada tahun 2009 sebesar 13,16%. Rata-rata laju pertumbuhan pajak hotel adalah sebesar 22,77%.

b. Laju Pertumbuhan Pajak Restoran

Tabel 6. Laju Pertumbuhan Pajak Restoran dari Tahun 2006-2013

Tahun	Realisasi Tahun Akhir (Rp)	Realisasi Tahun Awal (Rp)	Persentase (%)
2007	7.762.908.408,44	6.653.121.175,41	18,74
2008	8.965.376.803,28	7.762.908.408,44	18,71
2009	10.769.903.845,71	8.965.376.803,28	18,82
2010	14.929.491.495,95	10.769.903.845,71	19,23
2011	16.888.172.394,13	14.929.491.495,95	13,14
2012	20.302.610.876,34	16.888.172.394,13	18,82
2013	25.479.671.734,31	20.302.610.876,34	18,94
Rata-rata	25.479.671.734,31	6.653.121.175,41	11,11

Berdasarkan tabel laju pertumbuhan pajak retoran, dapat diketahui laju pertumbuhan pajak restoran di Kota Malang per tahun dari tahun 2006 hingga 2013. Laju pertumbuhan pajk restoran tertinggi pada tahun 2010 yaitu sebesar 19,23%. Dan laju pertumbuhan terendah ada pada tahun 2011 sebesar 13,14%. Rata-rata laju pertumbuhan pajak restoran adalah sebesar 11,11%.

c. Laju Pertumbuhan Pajak Hiburan

Tabel 7. Laju Pertumbuhan Pajak Hiburan dari Tahun 2006-2013.

Tahun	Realisasi Tahun Akhir (Rp)	Realisasi Tahun Awal (Rp)	Persentase (%)
2007	1.724.554.425,00	1.380.141.329,00	13,34
2008	1.778.167.000,50	1.724.554.425,00	18,39
2009	1.792.499.083,70	1.778.167.000,50	18,33
2010	2.041.298.212,05	1.792.499.083,70	18,67
2011	2.359.059.325,80	2.041.298.212,05	18,71
2012	3.134.172.824,60	2.359.059.325,80	19,11
2013	4.083.522.176,70	3.134.172.824,60	19,05
Rata-rata	4.083.522.176,70	1.380.141.329,00	21,54

Berdasarkan tabel laju pertumbuhan pajak hiburan dapat diketahui laju pertumbuhan pajak hiburan di Kota Malang per tahun dari tahun 2006 hingga 2013. Laju pertumbuhan tertinggi pada tahun 2011 yaitu sebesar 19,11%. Dan laju pertumbuhan terendah ada pada tahun 2007 sebesar 13,34%. Rata-rata laju pertumbuhan pajak hotel adalah sebesar 21,54%.

d. Upaya Dinas Pendapatan Daerah Untuk Mengoptimalkan Penerimaan Pajak Hotel, Pajak Restoran dan Pajak Hiburan

Saat ini pemerintah daerah yang diwakili oleh Dinas Pendapatan Daerah selaku SKPD telah melakukan upaya-upaya untuk mengurangi kebocoran pajak daerah, salah satunya dengan melaksanakan E-Tax (*Electronic Tax*). E-Tax mulai dilaksanakan pada bulan Oktober 2013, dengan melakukan pemasangan alat yang terhubung dengan Dinas Pendapatan Daerah Kota Malang untuk memantau transaksi yang ada pada wajib pajak. Sistem ini bekerja sama dengan bank BRI selaku penyedia jasa dan sampai saat ini baru 100 alat yang terpasang pada wajib pajak ([www.malangkota.go.id](http://www.malangkota.go.id)). Baru 4 (empat) pajak daerah yang menggunakan sistem ini, yaitu pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan dan pajak parkir, karena melihat potensi yang besar terhadap pajak daerah dan tidak sebanding dengan penerimaan yang diterima oleh pemerintah. Upaya ini belum terlihat dampaknya terhadap penerimaan pajak karena baru dilaksanakan oleh Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda). Terdapat mekanisme *online system* E-Tax yaitu :

1. Wajib Pajak mengirimkan data ke server Dispenda.
2. Data transaksi wajib pajak disimpan sebagai data base Dispenda melalui CMS.
3. Pada setiap bulannya (maksimal tanggal 10 setiap bulannya), melalui CMS wajib pajak mengirimkan format SPTPD elektronik ke Dispenda.
4. Petugas Dispenda melakukan pengecekan atas SPTPD elektronik yang dikirim oleh wajib pajak dengan melihat data base yang dimiliki oleh Dispenda.
5. Apabila data sudah benar dan sesuai dengan data base, maka melalui CMS petugas Dispenda menyampaikan kepada wajib pajak bahwa SPTPD elektronik tidak dapat diterima dan disesuaikan kembali sesuai dengan data base yang ada di Dispenda.
6. Atas ke tidak sesuaian data, maka wajib pajak dapat melakukan konfirmasi pada petugas Dispenda.
7. Atas data yang sudah sesuai, maka melalui CMS akan dikirimkan SKPD kepada wajib pajak, untuk kemudian melakukan proses Autodebet dengan menggunakan SSPD elektronik.

CMS atau *Cash Management System* adalah aplikasi perbankan yang disiapkan oleh rekanan Dinas Pendapatan Daerah yaitu Bank BRI, sehingga wajib pajak dapat melakukan aktivitas pembayaran pajak atau aktivitas lain yang ada hubungannya dengan bank. Contohnya transfer atau aktivitas *internet banking*.

## KESIMPULAN DAN SARAN

### Kesimpulan

1. Tingkat kontribusi penerimaan pajak hotel dalam kurun waktu 8 (delapan) tahun periode 2006-2013 terhadap pendapatan asli daerah berturut-turut adalah 5,32%, 4,06%, 5,47%, 5,66%, 6,46%, 4,38%, 4,25% dan 5,84%. Rata-rata kontribusi penerimaan pajak hotel terhadap pendapatan asli daerah yaitu sebesar 5,18%. Persentase rata-rata kontribusi penerimaan yang telah di capai oleh Kota Malang dari tahun 2006-2013 berada pada kriteria sangat kurang berkontribusi setiap tahunnya. Kemudian untuk tingkat kontribusi penerimaan pajak restoran dari tahun 2006 hingga 2013 berturut-turut adalah 10,68%, 8,00%, 10,75%, 11,71%, 13,16%, 9,09%, 8,82%, dan 10,68%. Rata-rata kontribusi penerimaan pajak restoran terhadap pendapatan asli daerah yaitu sebesar 10,36%. Persentase kontribusi penerimaan yang telah dicapai berada pada kriteria sangat kurang berkontribusi yaitu pada tahun 2007, 2011 dan 2012. Pada tahun 2006, 2008, 2009, 2010 dan 2013 berada pada kriteria kurang berkontribusi. Sedangkan untuk tingkat kontribusi penerimaan pajak hiburan dari tahun 2006 hingga 2013 berturut-turut adalah 2,21%, 1,78%, 2,13%, 1,95%, 1,80%, 1,24%, 1,36% dan 1,71%. Rata-rata kontribusi penerimaan pajak hiburan terhadap pendapatan asli daerah adalah sebesar 1,77%. Persentase rata-rata kontribusi penerimaan berada pada kriteria sangat kurang berkontribusi setiap tahunnya. Hal ini menggambarkan bahwa pemerintah Kota Malang belum mengoptimalkan potensi yang dimiliki oleh pajak hotel, pajak restoran dan pajak hiburan sebagai salah satu sumber penerimaan pendapatan asli daerah selama periode 2006-2013.
2. Tingkat efektivitas pajak hotel dalam kurun waktu 8 (delapan) tahun periode 2006-2013 berturut-turut yaitu 106,96%, 101,04%, 103,63%, 102,33%, 111,02%, 102,51%, 109,81% dan 125,37%. Rata-rata efektivitas pajak hotel yaitu sebesar 107,8%. Persentase efektivitas menunjukkan tingkat efektivitas berada pada kriteria sangat efektif dari tahun 2008-2013. Kemudian untuk tingkat efektivitas pajak restoran periode 2006 hingga 2013 berturut-turut yaitu 100,81%, 100,62%, 102,82%, 101,69%, 108,48%, 102,04%, 112,75% dan 118,85%. Rata-rata efektivitas pajak restoran yaitu sebesar 106,01%. Persentase efektivitas menunjukkan tingkat efektivitas berada pada kriteria sangat efektif kecuali pada tahun 2008 yang berada pada kriteria efektif karena di bawah 100%. Sedangkan tingkat efektivitas pajak hiburan pada tahun 2006-2013 berturut-turut adalah 87,63%, 109,15%, 101,44%, 100,25%, 112,90%, 124,29%, 158,85% dan 118,30%. Rata-rata efektivitas pajak hiburan dari tahun 2006 hingga 2013 adalah sebesar 114,10%. Persentase ini menunjukkan kriteria tingkat efektivitas pajak hiburan berada pada

kriteria sangat efektif dari tahun 2008-2013, kecuali pada tahun 2006 yang hasil menunjukkan berada di bawah 100%. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah Kota Malang yang diwakili oleh Dinas Pendapatan Daerah melakukan pemungutan pajak, baik pajak hotel, restoran dan hiburan dengan efektif, dibuktikan dengan hasil kriteria yang cenderung sangat efektif dimana realisasi selalu berada di atas target yang ditetapkan. Sementara itu melihat laju pertumbuhan rata-rata untuk pajak hotel dari tahun 2006 hingga 2013 adalah sebesar 22,77%. Kemudian untuk laju pertumbuhan rata-rata pajak restoran dari tahun 2006 hingga 2013 adalah sebesar 21,15% dan rata-rata laju pertumbuhan pajak hiburan dari tahun 2006 hingga 2013 adalah sebesar 16,76%.

#### Saran

1. Pemerintah Kota Malang yang diwakili oleh SKPD yaitu Dinas Pendapatan Daerah melakukan pendataan ulang wajib pajak secara berkala tidak hanya dilihat dari wajib pajak yang melaporkan SPTPD, tetapi juga terjun ke lapangan untuk melihat wajib pajak baru, sehingga data yang dimiliki itu benar dan jelas, sehingga dapat langsung terlihat potensi di masing-masing sektor pajak.
2. Dinas Pendapatan Daerah selaku SKPD yang menangani penerimaan daerah khususnya pajak, harus mempunyai data historis agar dalam menentukan target disetiap jenis pajak memiliki dasar penetapan target. Sehingga dapat dilihat dan dihitung potensi pajak yang sebenarnya di Kota Malang.
3. Dalam rangka meningkatkan penerimaan dari sektor pajak khususnya pajak hotel, restoran dan hiburan, Pemerintah Kota Malang melakukan perbaikan sistem dengan menggunakan E-Tax (*Electronic Tax*). Sistem ini dapat digunakan untuk meminimalisir kebocoran pajak serta dalam rangka mengawasi kepatuhan wajib pajak sesuai dengan tugas, pokok dan fungsi dari Dinas Pendapatan Daerah.

#### Daftar Pustaka

Ardiyansyah, Indra Widhi. 2005. *Analisis Kontribusi Pajak Hotel dan Restoran terhadap PAD Kabupaten Purworejo Tahun 1989-2003*. Yogyakarta: Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia.

Badan Pusat Statistik (BPS), 2000-2012. *Malang Dalam Angka*.

Bratakusumah, Deddy Supriady dan Dadang Solihin, 2001. *Otonomi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*. Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama.

Dajan, Anto.2009.*Pengantar Metode Statistik Jilid I*, Jakarta:LP3ES.

Dinas Pendapatan Daerah Kota Malang.2012-2013. *Info PAD*. Malang :Dispenda Kota Malang

Direktorat Jenderal Perimbangan dan Keuangan. 2012. *Transfer Pemerintah Pusat ke Pemerintah Daerah 2008 – 2012*

Halim, Abdul.2001.*Bunga Rampai Manajemen Keuangan Daerah*.Yogyakarta: UPP AMP YKPN.

\_\_\_\_\_.2004. *Manajemen Keuangan Daerah*.Yogyakarta: UPP AMP YKPN

Ketetapan MPR-RI Nomor XV/MPR/1998 tentang *Penyelenggaraan Otonomi Daerah*

Muluk, M.R. Khairul.2009. *Peta Konsep Desentralisasi Dan Pemerintahan Daerah*. Surabaya: ITS Press.

Musgrave, Richard A. And Peggy B. Musgrave.1989. *Public Finance in Theory and Practice*. New York: McGraw-Hill.

Nugraha dan Arvian Triantoro.2003. *Analisis Efektifitas Pajak Hotel dan Restoran Dan Kontribusinya Terhadap PAD di Kota Bandung*.

Sobandi, Baban.2005.“*Strategi Optimalisasi PAD (PAD): Kasus Kota Banjarmasin*”. (diakses tanggal 10 Januari 2014 dari <http://isjd.pdii.lipi.go.id>)

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2000 tentang *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang *Pemerintah Daerah*

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*

Widjaja, A.W. 1998. *Titik Berat Otonomi Daerah:Pada Daerah Tingkat II*.Jakarta:PT. Raja Grafindo.

Yoeti, Oka A.2008. *Ekonomi Pariwisata*. Jakarta: Penerbit Buku Kompas.